

## PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Nanda Kirana<sup>1\*</sup> Helmy Sukiswo<sup>2\*</sup>

\*Email : [nanda.wahyu.ak@upnjatim.ac.id](mailto:nanda.wahyu.ak@upnjatim.ac.id)  
[Wahyu.helmy.ak@upnjatim.ac.id](mailto:Wahyu.helmy.ak@upnjatim.ac.id)

UPN “ Veteran “ Jawa Timur<sup>1</sup>,

***Abstract** The purpose of this study was to examine articles related to government accounting information systems on the quality of financial reports produced. This study uses a Literature Review with 7 articles that have been selected from several articles published in 2018 to 2021 on Google Schoolaar. This study found that there are several factors that can affect the quality of financial reports that have been assisted by the system and rules that have been made by the government, so from these articles it can be concluded that the human resource factor is an important factor in the success of the information system. government accounting in decision making.*

***Keywords:** Accounting System, Financial Report.*

**Abstrak (Times New Roman 11, bold, italic, 1 spasi).** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji artikel yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang di hasilkan. Penelitian ini menggunakan Literatur Review dengan 7 artikel yang telah di pilih dari beberapa artikel yang di publish pada tahun 2018 hingga 2021 yang ada di google Schoolaar. Penelitian ini menemukan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang telah di bantu oleh adanya sistem dan aturan yang telah di buat oleh pemerintah, sehingga dari beberapa artikel ini dapat di tarik kesimpulan bahwa memang faktor sumber daya manusia adalah faktor penting dalam keberhasilan sistem informasi akuntansi pemerintah ini dalam pengambilan keputusan.

**Kata kunci:** sistem akuntansi, laporan keuangan.

## Pendahuluan

Perkembangan sektor publik di era globalisasi saat ini yang mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk memberikan kualitas informasi yang relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat, sehingga para lembaga pemerintah bebenah diri dalam menghadapi era digitalisasi ini dengan membuat dan mengupgrade sistem akuntansi yang dapat memberikan layanan yang prima serta transparan dan tepat waktu kepada masyarakat sehingga masyarakat menegenetahui informasi terkait dengan layanan maupun kegiatan pada badan pemerintah, dari badan pemerintah terkecil yaitu sekolah sampai ke badan pemerintah pusat.

Reformasi kegiatan yang di lakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi pada lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yaitu dengan melakukan sisitem pembukuan laporan keuangan berbasis akrual yang harus di patuhi oleh setiap instansi pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, yang akan di lakukan mulai tahun anggaran 2008.reformasi yang di lakukan pemerintah di bidang keuangan ini di tuangkan dalam Undang – Undang bidang Keuangan Negara tahun 2003 dan 2004. Reformasi ini bukan hanya mengatur terkait keuangan saja akan tetapi mengatur terkait dengan tata kelola yang ada dalam instansi pemerintah pusat maupun daerah. Reformasi keuangan ini sangat berperan penting dalam perubahan yang ada dalam instansi pemerintah di bidang akuntansi dalam laporan keuangan. Perubahan bidang akuntansi pemerintah ini memberikan dampak yang penting untuk menghasilkan suatu informasi laporan keuangan yang dapat di sediakan oleh pemerintah dan dapat digunakan untuk para pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. (naswan & irman,2020)

Regulasi dalam bidang keuangan Negara diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 terkait dengan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi ini memberikan dampak terkait sistem pengelolaan keuangan negara yang harus transparan dan akuntabel di pemerintah pusat maupun daerah. Opini WDP yang di keluarka oleh BPK terhadap suatu lembaga pemerintah Pusat akan berdampak pada seluruh Lembaga itu yang mempunyai wakil pada daerah di indonesia. Opini WDP memberikan dampak bahwa lembaga pemerintah tersebut mempunyai kegiatan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang belum efektif. (Rosiatul,Endar & Erna ,2021).

Laporan keuangan memegang peranan penting dalam pembuatan laporan pembukuan yang di dasarkan pada transaksi – transaksi yang dilakukan oleh lembaga sektor publik, yang bertugas untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan dan transaksi yang telah dilakukan. Lporan keuangan ini mempunyai nilai informasi untuk pengambilan keputusan para pihak yang berkepentingan dan memberikan evaluasi kinerja terhadap lembaga sektor publik. Nilai dari informasi laporan keuangan ini sangtlah penting dan sangtlah berguna bagi pengambilan keputusan maka laporan keuangan ini harus di mempunyai prinsip tepat waktu,dapat di percaya dan sesuai dengan standar yang di berlakukan oleh lembaga sektor publik yaitu Standar Akunatansi Pemerintah (SAP), yang merupakan aspek terpenting dalam pembuatan laporan keuangan ini guna untuk memberikan dan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang di sajikan sebagai dasar pengambilan keputusan pada tingkat lembaga pusat maupun daerah. (Fitri & Suratno,2018).

Sistem Akuntansi Pemerintah yang berawal menggunakan basis kas kemudian pada tahun 2015 terjadi perubahan basis kas menjadi basis akrual. Perubahan basis yang menjadli landasan baru sistem akuntansi pemerintah menjadi penyebab pemerintah memberikan kemudahan di bidang sistem pembukuan ini dengan meluncurkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yan merupakan implmentasi dari Peraturan Menteri

Kuungan Nomor 270/PMK.05/2014 terkait dengan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah pusat yang di atur dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Penerapan akuntansi berbasis akrual.(Hermin & Octavia,2020)

Dalam upaya merealisasikan pemerintahan yang baik maka dapat membutuhkan banyak upaya yang dilakukan untuk menjadikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wujud untuk realisasi pemerintahan yang baik maka perlu di susun dan di buat kebijakan – kebijakan serta aturan perundang undangan untuk penguatan sistem , standar, serta sumber daya manusia yang ada dalam lembaga pemerintah.

SAP yang awalnya berbasis kas kemudian berganti menjadi berbasis akrual yang mengakui beberapa hal yaitu, aset,kewajiban,pendapatan,beban dan ekuitas, basis akrual juga di jadikan dasar dalam pengakuan pendapatan,beban dan belanja yang ada dalam dalam pelaksanaan anggaran yang telah di tetapkan dalam APBN maupun APBD. Penerapan SAP dari basis kas ke basis akrual maka pemerintah pusat membuat sistem yang telah terintegrasi mUlai dari proses menganggarkan,melaksanakan dan melaporkan pada Bendahara Umum Negara dan lembaga yang terkait dengan APBN. Terkait dengan berubahnya basis SAP ini maka Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara ini memanfaatkan aplikasi yang di berikan pemerintah pusat yaitu SIBA. Aplikasi SIBA ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan negara yang di dalamnya mencakup Laporan Operasional dan Realisasi Anggaran, serta pada pelaporan tahunan harus di lengkapi dengan Catatan Laporan Keuangan (CALK).(Patrycia & Wulan,2018)

Laporan keuangan pemerintah pusat mencakup kegiatan yang dilakukan dan dikelola oleh lembaga pemerintah pusat yang terdiri dari entitas kementerian negara/lembaga dan entitas Bendahara Umum Negara (BUN). Pada saat ini lembaga pemerintah mempunyai 87 lembaga pemerintah dan satu Bendahara Umum Negara (BUN). Lembaga- lembaga pemerintah ini kemudian memberikan laporan keuangan lembaga pemerintah kepada BUN untuk di konsolidasikan menjadi satu laporan keuangan pemerintah.(iqbal,2018)

Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) mempunyai ketetapan dalam memberikan peringkat opini salah satunya yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun anggaran 2016,2017,2018. Opini ini di dasarkan dari kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dengan kecukupan laporan keuangan untuk mengungkapkan sesuai dengan SAP dan juga laporan keuangan yang patuh terhadap peraturan perundang undangan yang telah di tetapkan untuk menjaga keefektifitasan kkegiatan pengendalian laporan keuangan dari lembaga pemerintah. (BPK, 2018).

Sistem informasi akuntansi merupakan kegiatan memproses data dan transaksi untuk menjadikan outputnya adalah informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dalam implementasi aturan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Keuangan & Indonesia, 2014) yang berisi terkait dengan penggunaan dasar basis laporan keuangan dari kas menuju akrual yang di lakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. kedalam Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang telah sesuai dengan SAP berbasis kas menuju akrual dalam pembuatan laporan keuanagn maupun penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. SIBA memberikan layanan terhadap pengguna sistem ini untuk memberikan kemudahan dalam pembuat laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi kuantitatif akuntansi dari transaksi dan kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintah yang kemudian informasi tersebut memberikan informasi yang menjadi dasar keputusan bagi para pemegang kepentingan yang ada pada lembaga pemerintah. (yulia,2021)

Dari masalah dan lingkup penelitian yang telah di kumpulkan mengindikasikan bahwa

meskipun menggunakan sistem akuntansi instansi yang telah terintegrasi dengan baik akan tetapi sistem tersebut tidak bisa menjawab dan tidak berpengaruh terhadap Good Government Governance yang ada pada lembaga pemerintahan. Sistem akuntansi instansi ini berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan lembaga pemerintah sehingga kualitas laporan keuangan lembaga pemerintah sesuai dengan yang di inginkan dalam peraturan perundang undangan. Kualitas laporan keuangan yang di harapkan oleh pemerintah sesuai undang-undang terkadang ada beberapa lembaga pemerintah yang masih kesulitan dengan penggunaan sistem ini sehingga kualitas laporannya pun perlu di kaji ulang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana efisiensi dan dampak dari penggunaan sistem akuntansi instansi yang telah terintegrasi. Sehingga peneliti mendapatkan research gap terkait dengan faktor- faktor yang mempengaruhi keandalan sistem ini yang belum di angkat oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini di harapkan mampu untuk memberikan ide baru kepada pembaca untuk mengkaji ulang dan meneliti ulang faktor-faktor yang belum di kaji oleh penelitian sebelumnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mencari beberapa artikel terkait mengenai sistem akuntansi instansi yang ada di Indonesia, kemudian di pilih 7 artikel yang di anggap relevan untuk didiskusikan terkait dengan dampak dari penggunaan sistem yang telah di buat oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan *literatur review*. Penelitian yang di bahas dalam artikel ini yang telah di publikasikan dari tahun 2018 – 2021. Dalam mencapai tujuan dari penelitian ini tahap pertama yang di lakukan adalah mencari artikel yang akan di bahas pada google scholar. Langkah selanjutnya menentukan tahun artikel untuk dapat mengetahui perkembangan dari sistem ini sehingga dapat menentukan *gap research* untuk di teliti dalam penelitian selanjutnya.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Aspek Jumlah Artikel**

Ada 7 artikel yang sesuai dengan tema penelitian ini dan tujuan penelitian ini yang di cari dalam google scholar. Berdasarkan dari tahun terbit ada 2 artikel yang terbit pada tahun 2021, 2 artikel pada tahun 2020 dan 3 artikel pada tahun 2018.

#### **Aspek Tema Pembahasan Artikel**

Terkait dengan tema sistem akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan lembaga pemerintah ini terpilihlah 7 artikel yang secara spesifik membahas terkait dampak dari sistem akuntansi dengan kualitas laporan keuangan, dampak sistem terhadap Good Governance Government serta aspek yang mempengaruhi keandalan sistem ini.

Dari 7 artikel terkait dengan tema sistem akuntansi instansi pemerintah ini menunjukkan beberapa faktor yang memang mempengaruhi dan ada yang tidak mempengaruhi faktor sistem ini.

(Naswan & Irman, 2020) sistem akuntansi instansi meskipun memberikan kemudahan bagi para pengguna sistem ini tetapi tidak dapat mempengaruhi kemudahan bagi para pemakai sistem ini akan tetapi keefektifan serta kemudahan dalam pembuatan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan sangat membantu dengan adanya sistem yang di gunakan oleh para user.

Selain itu, (Rosiatul, Endar & Erna, 2021) faktor dari berhasilnya sistem akuntansi instansi ini adalah adanya keberhasilan terkait dengan Good Governance Government akan tetapi sistem informasi akuntansi pemerintah ini belum dapat memberikan nilai baik atau memberikan nilai Good Governance Government yang baik pada lembaga pemerintah, akan

tetapi sistem yang telah dilakukan beberapa perubahan ini telah memberikan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan yang telah diatur oleh undang-undang.

Dalam penelitian yang lain pun mempunyai sudut pandang dan perbedaan yang unik terkait faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi, (Fitri & Suratno, 2018) bahwa sistem informasi akuntansi yang baik akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang dibuat bahkan sumber daya manusia pun ikut mempengaruhi faktor dalam keberhasilan sistem informasi akuntansi dan juga pengendalian internal di dalam suatu lembaga pemerintah pun ikut serta dalam pengaruh kualitas laporan keuangan dan juga sistem informasi keuangan ini.

(Hermin & Octavia, 2020) bukan hanya sistem informasi akuntansi instansi saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan ini akan tetapi kedisiplinan dan kepatuhan sumber daya terhadap peraturan pemerintah yang dibuat pun ikut mempengaruhinya, sehingga beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya bukan hanya pada sektor sistemnya saja akan tetapi sumber daya manusia pun sangat berperan aktif dalam keberhasilan serta kualitas laporan keuangan ini.

Lebih detail lagi penelitian ini dilakukan (Patrycia & Wulan, 2018) sistem akuntansi informasi ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga negara, sama halnya (iqbal, 2018) sistem informasi akuntansi ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan bahkan beberapa faktor lain seperti sumber daya manusia dan kepatuhan akan peraturan pun ikut mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang telah dibuat.

#### Aspek Metodologi yang digunakan

Metodologi yang digunakan dalam beberapa artikel ini adalah pendekatan kualitatif, tetapi ada beberapa artikel juga yang memberikan pendekatan kuantitatif bahkan ada yang membuat penelitian ini mencampur dua metode yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif

#### Aspek Temuan Penting pada Artikel

Adanya pergantian regulasi dari pemerintah pusat yang menghendaki adanya kualitas laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya oleh lapisan masyarakat dan berbagai pihak internal maupun eksternal maka pemerintah membuat sistem informasi akuntansi yang berguna sebagai alat bantu dalam kegiatan pembuatan laporan keuangan sehingga hasil dan kualitas dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh berbagai pihak dalam sektor pemerintah sesuai dengan kegiatan yang ada dan kualitas dari laporan tersebut sangat bisa diandalkan dalam pengambilan keputusan.

Tetapi dari beberapa artikel yang direrutkan ini terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan ini mulai dari sumber daya manusia yang harus ditingkatkan sampai dengan cara untuk membuat sumber daya manusia yang ada dalam lembaga pemerintah dapat mematuhi dan disiplin terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedisiplinan serta kepatuhan dari sumber daya manusia ini sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat dan dilaporkan kepada para pimpinan dalam pengambilan keputusan setiap kegiatan yang dilakukannya sehingga keputusan yang dibuat ini tidak akan salah apabila kualitas dari laporan keuangan pemerintah dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

### **Simpulan**

Dari beberapa artikel yang di temukan dalam penelitian ini di temukan bahwa sumber daya manusia bisa mempengaruhi dan bisa tidak mempengaruhi dalam kualitas laporan keuangan serta faktor lain seperti Good Governance Government pun tidak dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan meskipun adanya sistem akuntansi instansi yang telah di buat.

penelitian berikutnya mungkin dapat mengkaji lebih lagi terkait sumber daya manusia serta pengendalian internal dan Good Governance Government dari beberapa faktor ini.

#### Daftar Pustaka

- Fitri Akbariah, Suratno. 2018 . “ Sistem Pengendalia Internal,Sistem Akuntansi Instansi,Kompetensi Sumber daya Manusia dan Kualitas Lporan Keuangan di Kementrian Agama Propinsi Banten.”Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan 5 (1).,2339 – 1554. Doi: <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/171/70>
- Rosiatul Aminy, Endar Pituringsih, Erna Widiastuti. 2021. “ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE, STANDARAKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-NUSA TENGGARA BARAT)”. Valid Jurnal Ilmiah 18 (2), 136-147. Doi : <http://stieamm.ac.id/jurnal/index.php/valid/article/view/181>
- Ramadhany, Yusuf setiawan. 2021. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH”. Jurnal Akuntansi 10 (1). Doi : <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/294>
- Hermin Dwi Khasanah, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti. 2020. “ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL DI RSJ PROF. DR. SOEROJO MAGELANG”. Jurnal Akuntansi,Kewirausahaan Dan Bisnis 5 (10), 145-153. Doi : <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/KURS/article/download/825/542/>
- Patrycia Marcellina Maria Tampemawa dan Wulan D. Kindangen. 2018. “IPTEKS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA”. Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat 2 (2), 533 – 536. Doi : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jiam/article/view/21825/21523>
- M. Iqbal Firdaus. 2018. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepatuhan Atas Peraturan, dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)”. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik 3 (2). Doi : <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/69>
- Naswan Hadilia, Irman Mamulati. 2020 “Pengaruh Kemudahan Dan Efektifitas Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Pemerintah Provinsi Maluku Utara”. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik 10 (2). Doi : <http://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/kawasa/article/view/442>
- Badan Pemerikasa Keuangan Republik lindoensia,2012. Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2011, Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta
- Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta
- Nomor 233/PMK.05/2015 Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.